

Longsor di Sungai Cidampit Bogor, Puluhan Warga Mengungsi Sementara

BOGOR (IM)- Puluhan warga di Gang Makam, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor mengungsi. Hal itu disebabkan adanya tanah longsor yang mengancam rumah warga sekitar.

“Tanah longsor pada badan Sungai Cidepit akibat keroposnya pondasi DAM yang rapuh karena usia yang juga berfungsi sebagai jembatan penyebrangan warga,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Hidayatulloh dalam keterangannya, Rabu (6/2).

Adapun tanah longsor itu terjadi pada Minggu (4/2). Longsor memiliki tinggi sekitar 6 meter dengan lebar kurang lebih 25 meter.

“Dampaknya (longsor) beberapa batang pohon terbawa material longsor

lalu menutupi badan Sungai Cidepit serta mengancam rumah warga dan fasilitas umum Posyandu dan pos ronda,” ungkapnya.

Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Hanya saja, terdapat 10 Kepala Keluarga (KK) dengan 31 jiwa yang terpaksa harus mengungsi untuk sementara karena rumahnya terancam.

“Berdasarkan assessment dan koordinasi tanggap darurat, penanaman pohon tumbang tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tanah longsor yang masih labil.

Untuk sementara warga terancam mengungsi ke rumah saudara terdekat dan diajukan huntara oleh pihak kelurahan setempat,” tutupnya. ● **gio**

Program PTSL di Kab. Cirebon Targetkan 40 Ribu Sertifikat

CIREBON (IM)- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon, kembali melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sebagai salah satu upaya untuk tertib administrasi pertanahan.

Bupati Cirebon, Imron, menyambut baik program yang digulirkan oleh BPN ini. Karena pentingnya program yang dilaksanakan oleh BPN tersebut, Imron meminta kepada para kuwu, untuk bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kepada para camat dan para kuwu, saya minta untuk bisa mendukung program ini,” kata Imron, saat menghadiri pelantikan panitia judikasi PTSL, Selasa (6/2).

Menurut Imron, dengan mengikuti kegiatan PTSL ini, nantinya masyarakat memiliki kekuatan hukum terkait kepemilikan tanahnya. Sehingga bisa meminimalisir terjadinya permasalahan tentang tanah.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada BPN, yang sudah banyak memfasilitasi puluhan ribu sertifikat tanah untuk masyarakat Kabupaten

Cirebon, sejak program PTSL ini dilaksanakan.

“Saya ucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi kegiatan ini,” ucap Imron.

Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Cirebon, Hesekiel Sijabat menuturkan, pada tahun ini, pihaknya memasar target untuk bisa menyelesaikan sebanyak 50ribu peta bidang tanah dan 40 ribu sertifikat, di Kabupaten Cirebon.

Hesekiel yakin, pada tahun ini prosesnya akan bisa lebih sukses dan bisa lebih cepat. Hal itu karena pada tahun sebelumnya, pihaknya berhasil menyelesaikan sebanyak 136 ribu peta bidang tanah dan 55 ribu sertifikat.

“Saya yakin tahun ini bisa lebih sukses dan lebih cepat,” kata Hesekiel. Dia menambahkan, untuk bisa menjamin suksesnya program tersebut, ia meminta dukungan dari seluruh masyarakat di Kabupaten Cirebon. Terlebih pada kuwu, untuk bisa lebih gencar mensosialisasikan program ini kepada masyarakat.

“Apalagi biayanya sangat murah, yaitu hanya Rp 150 ribu,” tukasnya. ● **pra**

Satpol PP Kabupaten Bogor Siap Sukseskan Pemilu 2024



Satpol PP Kabupaten Bogor siap sukseskan Pemilu tahun 2024.

BOGOR (IM)- Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu memimpin Apel Kesiapsiagaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) se-Kabupaten Bogor dalam menghadapi Pemilu dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Asmawa mengatakan, apel ini untuk menunjukkan kesiapan Satpol PP dalam rangka kesuksesan pesta demokrasi di Kabupaten Bogor. Apel Kesiapsiagaan dilaksanakan di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Senin (5/2).

Hadir mendampingi Pj. Bupati Bogor, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Asisten Administrasi (Asmin), Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang), Staf Ahli bidang ekonomi dan pembangunan, Kepala Satpol PP, dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Bogor. Asmawa Tosepu menegaskan, Satpol PP melaksanakan fungsi pelayanan dasar pemerintahan yaitu memastikan ketentraman, ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat. Oleh karenanya kita patut berbangga Satpol PP di Kabupaten Bogor, karena negara mengakui keberadaan kita dengan mengamalkan tugas dan fungsi yang sangat strategis.

“Tantangan di Kabupaten Bogor lebih besar dibandingkan dengan daerah lain, di samping luas wilayah yang besar, kemudian kabupaten dengan jumlah penduduk yang terbanyak di Indonesia, juga termasuk daerah rawan bencana. Maka laksanakan dengan bertanggung jawab tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada kita,” tandas Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu. ● **gio**

8 | Nusantara



GERAKAN PANGAN MURAH DI BANDUNG

Warga antre untuk membeli beras pada gerakan pangan murah yang digelar di Kodim 0618, Bandung, Jabar, Selasa (6/2). Pemkot Bandung menggelar gerakan pangan murah yang menjual kebutuhan pokok di bawah harga rata-rata guna mengendalikan inflasi di Kota Bandung.

Banyak Proyek Mangkrak, Ini Permintaan DPRD Kabupaten Bogor kepada DPUPR

Kedepan DPUPR harus berbenah dan mengevaluasi diri, jangan sampai Tahun 2025 mendatang kembali mendapatkan cacatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Jawa Barat. Caranya dengan membantu Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dalam upaya penagihan kerugian negara kepada kontraktor.

CIBINONG (IM)- Komisi III DPRD Kabupaten Bogor sudah memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) dalam mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Hal itu, karena sejumlah 50 proyek pembangunan

infrastruktur di DPUPR molor ke awal Tahun 2024, bahkan 4 proyek di antaranya tidak bisa diselesaikan atau mangkrak.

“Kami sudah memanggil DPUPR dalam RDP, Komisi III DPRD Kabupaten Bogor sudah menekankan agar men-

gambil sikap tegas dengan memblack list atau memasukkan penyedia jasa dan kontraktor yang pekerjaannya mangkrak,” kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Tuti Alawiyah kepada wartawan, Selasa (6/2).

Tuti Alawiyah menuturkan kepada 46 penyedia jasa atau kontraktor yang masih diberikan addendum atau waktu tambahan pekerjaan, maka ia minta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DPUPR melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

“PPK DPUPR harus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, tidak hanya kerja kontraktor tetapi juga terhadap para konsultan pengawas. Molor dan mangkraknya sejumlah

proyek ini tak lepas dari berfungsi atau tidaknya peran konsultan pengawas,” tutur Tuti Alawiyah.

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa selama beberapa tahun terakhir, DPUPR menjadi ‘langganan’ mendapatkan catatan atau temuan BPK-RI Perwakilan Jawa Barat dan bersama Dinas Kesehatan menjadi salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang paling banyak terjadi kelebihan bayar atau berpotensi merugikan keuangan negara.

“Tentunya kedepan DPUPR harus berbenah dan mengevaluasi diri, jangan sampai Tahun 2025 mendatang kembali mendapatkan cacatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-

RI Perwakilan Jawa Barat, caranya dengan membantu Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dalam upaya penagihan kerugian negara kepada kontraktor dengan total nilai sebesar Rp 6 miliar,” jelas Tuti.

Sementara itu, Sekretaris DPUPR Kabupaten Bogor, Edi Mulyadi menerangkan bahwa bakal ada penyedia jasa atau kontraktor yang akan masuk ke dalam daftar hitam.

“Yang jelas ada tambahan (kontraktor yang di-black list) sehubungan masih ada kegiatan pekerjaan infrastruktur yang blom melanjutkan kembali, karena kesulitan finansial. Namun kewenangan keputusan itu berada di tangan PPK,” terang Edi Mulyadi. ● **gio**

Gaungkan Peduli Lingkungan Agar Kab. Bogor Jadi Hijau dan Asri

BOGOR (IM)- Sebagai upaya untuk mendorong masyarakat Kabupaten Bogor peduli lingkungan serta mengedepankan aspek lingkungan hidup dalam aktivitas kegiatan pembangunan di Kabupaten Bogor,

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu melakukan silaturahmi dengan para penggiat Kampung Ramah Lingkungan (KRL) dan pendamping lingkungan hidup se-Kabupaten Bogor, di Auditorium Setda, Senin (5/2).

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menjelaskan bahwa, tema besar pembangunan saat ini baik itu di tingkat nasi-

onal, regional dan lokal adalah pembangunan yang berkelanjutan, artinya pembangunan yang mengedepankan aspek lingkungan.

“Sehingga harapannya walaupun frekuensi pembangunan yang sangat tinggi tetapi tidak mengesampingkan aspek lingkungan. Justru di tengah pesatnya pembangunan harus menghadirkan lingkungan yang senantiasa hijau, ramah dan segar.

“Apalagi Kabupaten Bogor ini merupakan daerah yang berpotensi rawan bencana. Sangat penting dalam menjaga lingkungan, alhamdulillah saya mengapresiasi

ternyata kesadaran warga masyarakat di Kabupaten Bogor ini sangat tinggi untuk senantiasa mengedepankan aspek lingkungan dalam kegiatannya,” ujar Pj. Bupati Bogor.

“Mudah-mudahan melalui kegiatan ini program lokal KRL Kabupaten Bogor bisa mendorong sukse program lingkungan nasional. Banyak yang sudah kita lakukan berkaitan dengan kegiatan berbasis lingkungan pertama pembuatan seribu lubang biopori, resapan air di daerah kekeringan dan rawan banjir serta lainnya,” tukasnya. ● **gio**



Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, menggaungkan budaya masyarakat peduli lingkungan untuk menjadikan Kabupaten Bogor hijau nan asri.

Banjir Grobogan Rendam 2.662 Rumah dan 56 Hektare Sawah

GROBOGAN (IM)- Banjir yang melanda di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, merendam setidaknya 2.662 rumah dan 56 hektare area persawahan di daerah setempat.

Berdasarkan update data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah pada 6 Februari 2024 pukul 12.00 WIB, banjir tersebut merendam 32 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Grobogan.

Selain itu, merendam 2.662 rumah, area persawahan seluas 56 hektar, fasilitas pendidikan 6 unit, rumah ibadah 1 unit, 1 kandang sapi, serta rusaknya talud, rabat beton, pemadasan.

Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, kondisi banjir saat ini sudah berangsur surut di beberapa titik. Saat ini masih dalam penanganan BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD Kabupaten Grobogan.

“Penyebab banjir tersebut adalah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada hari Senin malam, 5 Februari 2024,” kata Nana di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (6/2).

Nana menjelaskan, hujan dengan intensitas tinggi tersebut mengakibatkan volume air di tiga daerah aliran sungai (DAS) yaitu Sungai Lusi, Sungai Serang, dan Sungai Tuntang yang berada di Kabupaten Grobogan meluap.

Kecamatan yang terdampak banjir tersebut me-

liputi, Godong, Tawangharjo, Geyer, dan Tegowanu, Penawangan, Purwodadi, Toroh, Karangyung, Kedungjati, Tanggungharjo, Grobogan, dan Gubug.

Di Kecamatan Gubug, banjir menyebabkan Jalan Raya Purwodadi-Gubug terendam limpasan air di sisi Barat jembatan, sehingga lalu lintas terputus.

Terkait upaya penanganan, lanjut Nana, BPBD Provinsi Jawa Tengah terus berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Grobogan. Hal itu untuk memastikan kondisi di lapangan, baik evakuasi masyarakat terdampak, penyediaan dapur umum, dan distribusi logistik yang diperlukan.

“BPBD Kabupaten Grobogan bersama Pemprov Jawa Tengah dibantu TNI dan Polri terus melakukan langkah-langkah untuk evakuasi. Masyarakat yang terdampak kami arahkan ke beberapa tempat yang aman. Dapur lapangan dan pengiriman logistik juga dilakukan,” jelasnya.

BPBD Grobogan juga berkoordinasi dengan perangkat desa untuk melakukan assessment dan evakuasi warga yang terjebak banjir. Selain itu, juga melakukan pendistribusian nasi bungkus untuk warga yang terdampak banjir.

Usai dilakukan wawancara, Nana bersama sejumlah OPD Pemprov Jateng juga langsung meninjau lokasi banjir yang terjadi di Kabupaten Grobogan. ● **pra**